

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
NUSA TENGGARA TIMUR
AUDITED



018.09.2400.567783.000.KD
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR
JL. TIMOR RAYA KM.32 NAIBONAT,
KUPANG TIMUR, KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPTP NTT adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPTP NTT mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPTP NTT. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kupang, 31 Desember 2022

Kepala BPTP NTT,



Dr. Akhmad Hamdan, S.Pt.,MP

NIP.196902271991031004

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	v
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
II. NERACA	4
III. LAPORAN OPERASIONAL	5
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	7
A. PENJELASAN UMUM	7
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	14
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	19
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	24
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	29
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	31

DAFTAR LAMPIRAN

1. Neraca Perbandingan per 31 Desember 2022
2. Neraca Percobaan Saldo Awal Januari 2022
3. Neraca Percobaan AkruaI per 31 Desember 2022
4. Neraca Percobaan Kas per 31 Desember 2022
5. Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022
6. Laporan Operasional per 31 Desember 2022
7. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022
8. Laporan Realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid per 31 Desember 2022
9. Laporan Posisi BMN pada Neraca per 31 Desember 2022
10. Laporan Posisi BMN pada Neraca Saldo Awal 1 Januari 2022
11. Laporan persediaan per 31 Desember 2022
12. Berita Acara Stok Opname Persediaan
13. Surat Hasil Rekon
14. Berita Acara Rekon Internal

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPTP NTT yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kupang, 31 Desember 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Akhmad Hamdan, S.Pt.,MP
NIP.196902271991031004

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPTP NTT Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp322,551,379.00 atau mencapai 116.47% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp276.935.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp12,495,231,070.00 atau mencapai 97,35% dari alokasi anggaran sebesar Rp12,835,042,000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp368,570,465,598.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar 368,477,423,256.00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp93,042,342.00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp21,850,419.00 dan Rp368,548,615,179.00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp314,251,360.00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp14,418,610,267.00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-14,104,358,907,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp8,300,019.00 dan Defisit Rp0, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-14,096,058,888.00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp370,375,044,376.00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-14,096,058,888.00

kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp96,950,000.00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp12,172,679,691.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp368,548,615,179.00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BPTP NTT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

Uraian	Catatan	31 Desember 2022			31 Desember 2021
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	276,935,000.00	322,551,379.00	116.47	357,862,100.00
Jumlah Pendapatan		276.935.000,00	322,551,379.00	116.47	357,862,100.00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	8,317,915,000.00	8,013,401,725.00	96.34	8,918,962,498.00
Belanja Barang	B.4.	3,849,627,000.00	3,814,419,345.00	99.09	10,384,748,903.00
Belanja Modal	B.5.	667,500,000.00	667.410.000,00	99.99	174.180.000,00
Jumlah Belanja		12,835,042,000.00	12,495,231,070.00	97.35	19,477,891,401.00

II. NERACA

**BPTP NTT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021**

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
Aset Lancar			
Kasdi Bendahara/Pengeluaran		0,00	0,00
Piutang Bukan Pajak		0,00	0,00
Persediaan	C.1.1.	0,00	9.780.000,00
Persediaan yang belum diregister		0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		0,00	9.780.000,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	334.639.404.000,00	334.539.404.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	13.638.201.923,00	13.638.601.923,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	41.030.292.690,00	40.562.882.690,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	2.944.213.634,00	2.844.213.634,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	68.824.025,00	68.824.025,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7.	-23.843.513.016,00	-21.382.993.355,00
Jumlah Aset Tetap		368.477.423.256,00	370.270.532.917,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	17.573.573,00	17.573.573,00
Aset Lain-lain	C.4.2.	348.909.478,00	348.909.478,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3.	-273.440.709,00	-269.942.576,00
Jumlah Aset Lainnya		93.042.342,00	96.540.475,00
Jumlah Aset		368.570.465.598,00	370.376.853.392,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	21.850.419,00	1.809.016,00
Uang Muka dari KPPN	C.5.2.	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		21.850.419,00	1.809.016,00
Jumlah Kewajiban		21.850.419,00	1.809.016,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	368.548.615.179,00	370.375.044.376,00
Jumlah Ekuitas		368.548.615.179,00	370.375.044.376,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		368.570.465.598,00	370.376.853.392,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BPTP NTT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	314,251,360.00	353,006,042.00
JUMLAH PENDAPATAN		314,251,360.00	353,006,042.00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	8,011,921,709.00	8,918,378,439.00
Beban Persediaan	D.3.	186,204,500.00	550,497,800.00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2,179,405,542.00	4,983,321,402.00
Beban Pemeliharaan	D.5.	1,077,138,066.00	1,082,537,942.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	499,922,656.00	2,077,605,949.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	0.00	1,800,375,810.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	2,464,017,794.00	2,597,582,194.00
JUMLAH BEBAN		14,418,610,267.00	22,010,299,536.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-14,104,358,907.00	-21,657,293,494.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	8.300.019,00	124.226.058,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-14,096,058,888.00	-21,620,008,698.00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-14,096,058,888.00	-21,620,008,698.00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BPTP NTT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
EKUITAS AWAL	E.1.	370.375.044.376,00	372.794.197.511,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-14,096,058,888.00	-21,620,008,698.00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	96.950.000,00	80,826,262.00
Koreksi nilai persediaan	E.3.1.	96.950.000,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.2.	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.3.	0,00	80,826,262.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	12,172,679,691.00	19,120,029,301.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	-1,826,429,197.00	-2,419,153,135.00
EKUITAS AKHIR	E.6.	368,548,615,179.00	370,375,044,376.00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPTP NTT

BPTP NTT didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai visi “Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani” (agar disesuaikan sesuai dengan kebijakan teknis yang ada di instansi masing-masing).

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPTP NTT. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BPTP NTT menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPTP NTT

dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPTP NTT yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPTP NTT adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPTP NTT telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	276.935.000,00	276.935.000,00
Jumlah Pendapatan	276.935.000,00	276.935.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	10.356.600.000,00	8,317,915,000.00
Belanja Barang Operasional	1.242.354.000,00	1.242.354.000,00
Belanja Barang Non Operasional	2.444.007.000,00	666,627,000.00
Belanja Barang Persediaan	104.800.000,00	79.500.000,00
Belanja Jasa	574.200.000,00	282,000,000.00
Belanja Pemeliharaan	1.078.646.000,00	1.078.646.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.503.000.000,00	500,500,000.00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	1.800.000.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.500.000,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	567.500.000,00	567.500.000,00
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	100.000.000,00	100.000.000,00
Jumlah Belanja	20.803.607.000,00	12,835,042,000.00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 322,551,379.00 atau mencapai 116,47% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp276.935.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0,00	14,892,000.00	0,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Pendapatan sewah tanah, gedung dan bangunan	25.000.000,00	92,137,860.00	368,55
Pendapatan hasil Penelitian/riset dan Hasil Pengembangan IPTEK	251.935.000,00	207,221,500,00	82,25
Pendapatan Lain-lain	0	8.300.019,00	0
Jumlah	276.935.000,00	322,551,379.00	116,47

Realisasi Pendapatan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 11,75% dibandingkan TA 2021. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BPTP NTT adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	14,892,000.00	24.990.000,00	-68%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Pendapatan sewah tanah, gedung dan bangunan	92,137,860.00	81.150.839,00	12%
Pendapatan asil Penelitian/riset dan Hasil Pengembangan IPTEK	207,221,500,00	151.128.500,00	27%
Pendapatan Lain-lain	8.300.019,00	4.856.058,00	41%
Jumlah	322.551.379,00	262.125.397,00	19%

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2022 adalah sebesar Rp9.662.672.893,00 atau 65,28% dari anggaran belanja sebesar Rp14.821.107.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2022

Uraian	2022			
	Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai		8,317,915,000.00	8,013,401,725.00	96,34
Belanja Barang		3,849,627,000.00	3,814,419,345.00	99,09
Belanja Modal		667,500,000.00	667,410,000.00	99,99
Total Belanja Kotor		12,835,042,000.00	12,509,062,728.00	97,35
Pengembalian Belanja			,00	0.00
Total Belanja		12,835,042,000.00	12,509,062,728.00	97,35

Dibandingkan dengan Tahun 2021, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami penurunan sebesar 64,15% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Program kegiatan DIPA Tahun Anggaran 2022 jumlahnya menurun dibandingkan Tahun Anggaran 2021
2. Penurunan belanja karena terdapat transformasi lembaga yang menyebabkan jumlah pegawai berkurang.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	.%
Belanja Pegawai	8,013,401,725.00	8,918,962,498.00	-11,30
Belanja Barang	3,814,419,345.00	10,384,748,903.00	-172,25
Belanja Modal	667,410,000.00	174,180,000.00	73,90
Total Belanja	12.495.231.070,00	19.477.891.401,00	-64,15

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 8.013.401.725,00 dan Rp 8.918.962.498,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2022 mengalami penurunan sebesar 11,30% dari TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penurunan belanja karena terdapat transformasi lembaga yang menyebabkan jumlah pegawai berkurang sebanyak 15 pegawai;
2. Terdapat pegawai yang memasuki masa purna bakti sebanyak 4 pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	8,013,401,725.00	8,918,962,498.00	-10,15
Jumlah Belanja Kotor	8,013,401,725.00	8,918,962,498.00	-10,15
Pengembalian Belanja Pegawai	,00	,00	
Jumlah Belanja	8,013,401,725.00	8,918,962,498.00	-10,15

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3,814,419,345,00 dan Rp10,384,748,903.00. Realisasi belanja barang TA 2022 mengalami penurunan sebesar -172,25% dari TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pada TA 2021 terdapat program kerjasama Bantuan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat, sedangkan pada TA 2022 tidak ada.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1,236,351,787.00	908.280.073,00	36,12
Belanja Barang Non Operasional	663,510,618.00	3.720.485.035,00	-82,17
Belanja Barang Persediaan	79,500,000.00	449.896.000,00	-82,33
Belanja Jasa	258,679,218.00	354.556.294,00	-27,04
Belanja Pemeliharaan	1,078,538,166.00	1.074.269.742,00	0,40
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	499,922,656.00	2.077.605.949,00	-75,94
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0.00	1.799.655.810,00	-100
Jumlah Belanja Kotor	3.816.502.445,00	10.384.748.903,00	-63,25
Pengembalian Belanja Barang	-13,831,658.00	0,00	100
Jumlah Belanja	3.802.670.787,00	10.384.748.903,00	-63,38

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp667.410.000,00 dan Rp174.180.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar -69,30% dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh: Karena Program kegiatan Pengembangan BMN dan Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 lebih banyak dari TA 2021.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	24.432.000,00	-100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	667.410.000,00	149.748.000,00	345,69
Jumlah Belanja Kotor	667.410.000,00	174.180.000,00	283,17
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	667.410.000,00	174.180.000,00	283,17

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp24.432.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 mengalami penurunan sebesar -100,00% dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh Karena Penurunan Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	24.432.000,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	24.432.000,00	-100,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	24.432.000,00	-100,00

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp667.410.000,00 dan Rp149.748.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 mengalami penurunan sebesar -28,69% dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh Karena Penurunan Anggaran Belanja Modal Gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2022

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	667.410.000,00	149.748.000,00	345,69
Jumlah Belanja Kotor	667.410.000,00	149.748.000,00	345,69
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	667.410.000,00	149.748.000,00	345,69

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp562.000,00 dan Rp9.780.000,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2022 dan 30 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021
Bahan Baku	0,00	9.780.000,00
Jumlah	0,00	9.780.000,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPTP NTT per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp334.639.404.000,00 dan Rp334.539.404.000,00. Pertambahan nilai tanah selama periode TA 2022 adalah sebesar Rp100.000.000,00. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel
A. Saldo Awal	334.539.404.000
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	333.216.120.000
Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	1.294.900.000
Tanah sawah irigasi	28.384.000
B. Mutasi Tambah	100.000.000
Pengembangan Tanah melalui KDP (bronjongan)	100.000.000
C. Mutasi Kurang	0
D. Saldo Akhir	334.639.404.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPTP NTT per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp13.638.201.923,00 dan Rp13.638.601.923,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	13.638.601.923,00
Mutasi Kurang	
Selisih akun 13211 (peralatan dan mesin dikarenakan adanya kode barang 6020301001 (piala)	-400.000,00
Saldo per 31 Desember 2022	13.638.201.923,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-11,711,126,004.00
Nilai Buku per 31 Desember 2022	1,927,075,919.00

Terdapat mutasi kurang dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perpindahan akun 13211 (peralatan dan mesin dikarenakan adanya kode barang 6020301001 (piala) senilai Rp400.000) menjadi akun 135121 (aset tetap lainnya) dikarenakan Migrasi Sakti yang memiliki perbedaan mapping dengan aplikasi sebelumnya SIMAK BMN.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPTP NTT per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 41,030,292,690.00 dan Rp 40,562,882,690.00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	40.562.882.690,00
Mutasi Tambah	
Pengembangan Melalui Penambahan nilai	467.410.000,00
Saldo per 31 Desember 2022	41.030.292.690,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-10,753,594,591.00
Nilai Buku per 31 Desember 2022	30,276,698,099.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Pengembangan Pedok Kandang Sapi KP Lili melalui Penyelesaian KDP Tahun 2022 senilai Rp109,981,000
2. Pengembangan Gapura/Gerbang beserta tembok pagar batas jalan depan kantor BPTP NTT melalui penyelesaian KDP Tahun 2022 senilai Rp157.447.000
3. Pengembangan Pagar permanen yang berlokasi di belakang kantor BPTP NTT melalui penyelesaian KDP Tahun 2022 senilai Rp199.982.000

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPTP NTT per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.944.213.634,00 dan Rp2.844.213.634,00.

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	2,844,213,634	0	2,844,213,634
B. Mutasi Tambah	100.000.000	0	100.000.000
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	2,944,213,634	0	2,944,213,634

Penjelasan mutasi penambahan Jalan, irigasi, dan jaringan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan jalan usaha tani KP Naibonat senilai Rp100.000.000,00

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BPTP NTT per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp68.824.025,00 dan Rp68.824.025,00.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki BPTP NTT per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPTP NTT per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp-22.610.828.782,00 dan Rp-21.382.993.355,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	13.638.201.923,00	- 11,711,126,004.00	1,927,075,919.00
2.	Gedung dan Bangunan	41.030.292.690,00	- 10,753,594,591.00	30,276,698,099.00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.844.213.634,00	-1.378.792.421,00	1.465.421.213,00
4.	Aset Tetap Lainnya	68.824.025,00	0,00	68.824.025,00
Akumulasi Penyusutan		57.581.532.272,00	-23.843.513.016,00	33.738.019.256,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp17.573.573,00 dan Rp17.573.573,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

C.3.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki BPTP NTT per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp349.205.909,00 dan Rp349.205.909,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPTP NTT serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BPTP NTT per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp-271.691.643,00 dan Rp-269.942.576,00.

.Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	17.573.573,00	-17.213.573,00	360.000,00
2.	Aset Lain-lain	349.205.909,00	-256.523.567,00	92.682.342,00
Akumulasi Penyusutan		366.779.482,00	-273.737.140,00	93.042.342,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp583,749,643,00 dan Rp1.809.016,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada BPTP NTT per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	583.749.643,00	1.809.016,00
Jumlah	583.749.643,00	1.809.016,00

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp368.548.615.179,00 dan Rp370.375.044.376,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp297,025,956,00 dan Rp227.621.194,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	207.221.500,00	207.610.500,00	-0,19
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	14.892.000,00	30.930.000,00	-51,85
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	71.230.000,00	87.620.000,00	-18,71
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	4.800.000,00	-100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	20.907.860,00	22.045.542,00	-5,16
Jumlah	314.251.360,00	353.006.042,00	-10,98

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.841.466.250,00 dan Rp6.948.019.937,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	5.498.073.880,00	6.532.825.293,00	-15,84
Beban Pembulatan Gaji PNS	81.965,00	91.312,00	-10,24
Beban Tunj. Anak PNS	129.257.070,00	164.255.016,00	-21,31
Beban Tunj. Beras PNS	319.589.460,00	335.666.700,00	-4,79
Beban Tunj. Fungsional PNS	544.135.000,00	703.970.000,00	-22,70
Beban Tunj. PPh PNS	34.153.626,00	39.254.889,00	-13,00
Beban Tunj. Struktural PNS	23.940.000,00	23.040.000,00	3,91

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	400.310.708,00	494.304.090,00	-19,02
Beban Tunjangan Umum PNS	185.225.000,00	230.900.000,00	-19,78
Beban Uang Makan PNS	877.155.000,00	1.078.916.000,00	-18,70
Jumlah	8.011.921.709,00	9.603.223.300,00	-16,57

Terdapat kenaikan realisasi anggaran beban pegawai dibandingkan periode tahun sebelumnya diakarenakan berkurangnya jumlah pegawai dari periode tahun sebelumnya. Jumlah nilai Beban Pegawai TA 2022 per 31 Desember 2022 tidak sama dengan nilai realisasi anggaran akun 51 pada neraca kas dikarenakan adanya pembayaran kekurangan gaji atas kenaikan pangkat TAYL senilai Rp1.809.016,- dan terdapat belanja pegawai yang masih harus dibayar senilai Rp329.000,- berupa kenaikan pangkat pegawai pada TA 2022.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp182.798.000,00 dan Rp211.153.900,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	106.730.000,00	280.581.000,00	-61,96
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	25.500,00	0,00	100,00
Beban Persediaan konsumsi	77.024.500,00	221.426.150,00	-65,21
Beban persediaan lainnya	2.450.000,00	52.477.000,00	-95,33
Jumlah	186.230.000,00	554.484.150,00	-66,41

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.490.463.445,00 dan Rp2.758.671.997,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.101.352.065,00	752.834.572,00	46,29

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	116.342.500,00	120.600.000,00	-3,53
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	17.999.722,00	34.845.501,00	-48,34
Beban Bahan	164.212.318,00	282.400.900,00	-41,85
Beban Honor Output Kegiatan	155.070.000,00	388.396.000,00	-60,07
Beban Barang Non Operasional Lainnya	344.228.300,00	1.009.218.500,00	-65,89
Beban Langganan Listrik	238.443.887,00	237.670.144,00	0,33
Beban Langganan Telepon	35.887.450,00	35.954.750,00	-0,19
Beban Langganan Air	5.869.300,00	5.745.400,00	2,16
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	2.040.469.635,00	-100,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	75.186.000,00	-100,00
Beban Jasa Profesi	-	-	0,00
Jumlah	2.179.405.542,00	4.983.321.402,00	-56,27

D.5. Beban Pemeliharaan.

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp927.387.253,00 dan Rp859.339.332,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	462.178.710,00	440.343.210,00	4,96
Beban Pemeliharaan Lainnya	304.542.700,00	309.266.505,00	-1,53
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	302.397.656,00	315.720.027,00	-4,22
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.993.500,00	8.940.000,00	-10,59
Jumlah	1.077.112.566,00	1.074.269.742,00	0,26

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp337.638.540,00 dan Rp1.159.410.375,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	431.422.656,00	908.263.199,00	-52,50
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	1.011.854.150,00	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	68.500.000,00	157.488.600,00	-56,50
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00
Jumlah	499.922.656,00	2.077.605.949,00	-75,94

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp598.008.060,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00	1.800.375.810,00	-100,00
Jumlah	0,00	1.800.375.810,00	-100,00

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.229.584.492,00 dan Rp1.347.643.985,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Paten	80.000,00	80.000,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.640.495.902,00	1.630.382.613,00	0,62
Beban Penyusutan Irigasi	52.533.679,00	52.533.677,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	51.151.560,00	71.624.060,00	-28,58
Beban Penyusutan Jaringan	18.498.552,00	18.498.552,00	0,00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	3.418.133,00	3.418.133,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	697.839.968,00	821.045.159,00	-15,01
Jumlah	2.464.017.794,00	2.597.582.194,00	-5,14

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0,00	119.370.000,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	5.300.000,00	0,00	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3.000.019,00	4.856.058,00	-38,22
Jumlah	8.300.019,00	124.226.058,00	-93,32

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp370.375.044.376,00 dan Rp372.794.197.511,00

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp-10,710,822,849,00 dan Rp-13.562.956.789,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp96.950.000,00 dan Rp0,00

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp96.950.000,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi Saldo Awal Persediaan sebagaimana dilampirkan Surat Keterangan Saldo Awal Persediaan Nomor 1753/PL.210/H.12.18/06/2022 dengan rincian sebagai berikut:

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
11713	Bahan Baku	20.700 kg	96.950.000
1.01.01.05.999	Bahan Baku Lainnya (Benih Jagung Lamuru)	20.700 kg	96.950.000

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9,365,646,937,00 dan Rp13.202.456.929,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua

atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2022.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 30 Septmber 2022
Ditagihkan ke Entitas Lain	12.495.231.070,00
Diterima dari Entitas Lain	- 322.551.379,00
Jumlah	12.172.679.691,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2022 saldo DDEL adalah sebesar Rp-322.561.379,00 sedangkan DKEL sebesar Rp12.495.231.070,00.

E.4.2. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1.	Nama Pemberi Hibah 1	Barang/Jasa/Lainnya	00,00
Jumlah Nilai Hibah			0,00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp368.548.615.179,00 dan Rp370.375.044.376,00

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**F.1. Pengungkapan Lain-lain****1. Kronologis Revisi Anggaran (DIPA/POK) BPTP NTT Tahun Anggaran 2022**

No	Revisi ke-	Tanggal	Narasi	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	DIPA Awal	17 November 2021		20.803.607.000
2	Revisi ke-1	17 Maret 2022	Pengurangan PAGU untuk kegiatan Strategis	20.771.107.000
3	Revisi ke-2	03 Juni 2022	Penambahan jumlah blokir Anggaran (Automatic Adjustment (AA))	20.771.107.000
4	Revisi ke-3	27 September 2022	Pengurangan PAGU untuk kegiatan Strategis	14.821.107.000
5	Revisi ke-4	14 Oktober 2022	Pengurangan PAGU karena automatic adjustmen anggaran belanja pegawai dan belanja barang	13.662.833.000
6	Revisi ke-5	17 Oktober 2022	Penyesuaian PAGU dari kode akun dan kegiatan	13.662.833.000
7	Revisi ke-6	25 Oktober 2022	Penyesuaian PAGU dari kode akun dan kegiatan	13.662.833.000
8	Revisi ke-7	31 Oktober 2022	Penyesuaian Halaman III DIPA	13.662.833.000
9	Revisi ke-8	02 Desember 2022	Pengurangan PAGU karena automatic adjustmen anggaran belanja pegawai dan belanja barang	12.835.042.000
10	Revisi ke-9	08 Desember 2022	Penyesuaian Halaman III DIPA	12.835.042.000

2. Belanja Barang untuk Penanganan Pandemic Covid-19

KD SATKER	KD KEGIATAN	KD OUTPUT	AKUN	NM AKUN	REVISI DIPA	BELANJA	SISA	PENGUNAAN BELANJA *Merujuk pada SE DJPB.0369_2020
567783	EBA	994	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	18.000.000	17.999.722	278	Belanja barang operasional untuk keperluan penanganan pandemi covid-19 diperuntukkan bagi seluruh ASN, honorer, dan UHL BPTP NTT (Hand Sanitizer, sabun pencuci tangan, masker)
Jumlah					18.000.000	17.999.722	278	

3. Selisih Penerimaan Negara Bukan Pajak pada LRA dengan LO, belanja pegawai pada LRA dengan LO

Keterangan Selisih LRA dan LO				
Uraian	Nilai di LRA (Rp)	Nilai di LO (Rp)	Selisih	Keterangan
PNBP	297.025.956	290.215.114	6.810.842	<p>Selisih terjadi karena terdapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Piutang lainnya berupa pembayaran sewa rumah dinas dari potongan gaji yang sudah terkirim SPMnya di bulan September namun baru masuk pembayarannya di bulan Oktober. Rp1.489.177,- Penerimaan kembali belanja pegawai senilai Rp3.000.019,- dan penerimaan kembali belanja barang Rp5.300.000,-. <p>Penerimaan kembali belanja pegawai ditambah Penerimaan kembali belanja barang dikurangi piutang lainnya sehingga LRA lebih besar dengan nilai Rp6.810.842,-</p>
Belanja Pegawai – Beban Pegawai	8.013.401.725	8.011.921.709	(1.480.016)	<p>Selisih terjadi karena terdapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembayaran kekurangan gaji atas kenaikan pangkat TAYL senilai Rp1.809.016,- Belanja pegawai yang masih harus dibayar Rp329.000,00 <p>Pembayaran kekurangan gaji atas kenaikan pangkat TAYL (2021) menambah nilai Belanja Pegawai pada LRA, sedangkan belanja pegawai yang masih harus dibayar (2022) mengurangi nilai LRA. $1.809.016 - 329.000 = 1.480.016$ Sehingga pada Belanja pegawai (LRA) lebih besar dari Beban Pegawai (LO) dengan selisih Rp1.480.016,00</p>

4. Penjelasan Permasalahan Tanah di BPTP NTT

- Terdapat Aset Tetap berupa Tanah di Kebun Percobaan Lili sebanyak 1 bidang seluas 35 ha (dalam satu sertifikat dengan 2 bidang lainnya milik Badan SDMP cq. SPP Kupang seluas 26,2 ha dan 41 ha), terhadap 3 bidang tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Badan SDMP menjadi an. Pemerintah RI cq Kementan. BPTP hanya mencatat tanah KP Lili seluas 35 ha dan 2 bidang lainnya dicatat oleh SPP Kupang.
- Terdapat Aset Tetap berupa Tanah Sawah Irigasi di eks Lab Diseminasi Kupang seluas 400 m2 tidak didukung bukti kepemilikan dan masih bersengketa dengan warga.

5. Rekap BMN sudah terbit Penetapan Status Pengguna (PSP) dan belum PSP

No,	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaannya Rp	Belum Ditetapkan Status Penggunaannya Rp
1	Tanah	333.093.682.000	1.545.722.000
2	Peralatan dan Mesin	9.079.332.063	4.880.027.686
3	Gedung dan Bangunan	23.383.292.253	17.647.000.437
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.046.273.719	1.954.235.915
5	Aset Tetap Lainnya	496.824.025	-
6	Aset Tak Berwujud	-	-
	TOTAL	298.050.144.667	94.537.274.656

Catatan : nilai yang digunakan dalam tabel PSP di atas adalah nilai perolehan.

6. Ketidakesesuaian akun Pencatatan Belanja Modal

Selama periode TA 2022 telah terjadi beberapa koreksi akun perolehan BMN dengan rincian sebagai berikut :

Transaksi Perolehan Pembelian yang dikoreksi Karena Kesalahan Akun dari Operator Komitmen

No	Nomor Kontrak	Uraian Kontrak	Nilai Kontrak	Kodefikasi Barang dari komitmen	Uraian Kodefikasi Barang
1	402/PL.010/H.12.18/02/2022	PERENCANAAN TEKNISPENATAAAN BRONJONGAN	5.000.000	5020106017 (NUP 1)	Bangunan Talud Penahan
2	400/PL.010/H.12.18/02/2022	PERENCANAAN TEKNIS REHAB PAGAR KP NAIBONAT	10.000.000	4040104001 (NUP 2)	Pagar Permanen
3	373/PL.010/12.18/02/2022	PERENCANAAN TEKNIS REHAB PAGAR DAN GAPURA GERBANG KANTOR	7.500.000	4040104001 (NUP 3)	Pagar Permanen
4	360/PL.010/H.12.18/02/2022	PERENCANAAN TEKNIS REHAB PEDOK KANDANG INVIDU TERNAK SAPI	10.000.000	2010104012 (NUP 1)	Tanah Bangunan Kandang

Penghapusan atas koreksi pencatatan transaksi di atas dibukukan sesuai dengan tanggal surat keterangan dibuat yaitu 30 Juni 2022.

Selanjutnya atas koreksi yang sudah dilakukan maka dilakukan penginputan kembali dengan kodefikasi barang yang seharusnya. Penginputan menggunakan transaksi perolehan lainnya KDP dengan rincian sebagai berikut:

Transaksi Perolehan Lainnya KDP

No	Nomor Kontrak	Uraian Kontrak	Nilai Kontrak	Kodefikasi Barang	Uraian Kodefikasi Barang
1	402/PL.010/H.12.18/02/2022	PERENCANAAN TEKNIS PENATAAAN BRONJONGAN	5.000.000	7010101001 (NUP 1)	Tanah dalam pengerjaan
2	400/PL.010/H.12.18/02/2022	PERENCANAAN TEKNIS REHAB PAGAR KP NAIBONAT	10.000.000	7010101003 (NUP 1)	Gedung dan bangunan dalam pengerjaan
3	373/PL.010/12.18/02/2022	PERENCANAAN TEKNIS REHAB PAGAR DAN GAPURA GERBANG KANTOR	7.500.000	7010101003 (NUP 2)	Gedung dan bangunan dalam pengerjaan
4	360/PL.010/H.12.18/02/2022	PERENCANAAN TEKNIS REHAB PEDOK KANDANG INVIDU TERNAK SAPI	10.000.000	7010101003 (NUP 2)	Gedung dan bangunan dalam pengerjaan (dicatat dalam subsatker 567783.002KD)